



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Januari 2024/Periodik - 2023)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
**UNIT KERJA** : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : PUTU ARIADI PRIBADI
2. Jabatan : KEPALA BADAN
3. NHK : 248829

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.698.943.000

1. Tanah Seluas 130 m2 di KAB / KOTA BULELENG, HASIL SENDIRI  
Rp. 193.843.000
2. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA BULELENG, HASIL SENDIRI  
Rp. 157.600.000
3. Tanah Seluas 1200 m2 di KAB / KOTA BULELENG, HASIL  
SENDIRI Rp. 342.000.000
4. Tanah Seluas 100 m2 di KAB / KOTA BULELENG, HASIL SENDIRI  
Rp. 28.500.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 500 m2/100 m2 di KAB / KOTA  
BULELENG, HASIL SENDIRI Rp. 307.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 7260 m2/6500 m2 di KAB / KOTA  
BULELENG, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 3500 m2/1790 m2 di KAB / KOTA  
BULELENG, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. ----

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. ----

**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 2.818.000

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

**Sub Total** Rp. 1.701.761.000

**III. HUTANG** Rp. 853.462.187

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 848.298.813



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.